

ABSTRACT

Elwiana Monica (1305003408)

THE BEIJING CONSENSUS: CHINA'S FOREIGN POLICY IN SUB-SAHARAN AFRICA COUNTRIES (ANGOLA AND SUDAN) DURING HU JINTAO ERA

(xi + 83 pages; 20 books; 1 government official statement; 11 journals; 54 online resources)

KEY WORDS: Beijing Consensus, National Interest, National Economic Interest, Foreign Policy, Foreign Economic Policy, Foreign Economic Policy Instruments, Foreign Direct Investment, Trade Agreement, Foreign Aid

The political economic model of China has succeeded in generating massive economic growth within international community over time. In the last three decades, economy of China has been flourishing rapidly as a result of economic model of Beijing Consensus. China's economic model introduces the market authoritarianism in Sub-Saharan Africa (Angola and Sudan). This study discusses about the recent development in China that has arguably become comparable to the Washington Consensus. However, the criticisms against the Beijing Consensus are that it disregards environmental issues, human rights principles, and governmental transparency.

The research questions are:

1. How are the elements of Beijing consensus implemented in economic relations between china and Sub-Saharan Africa countries?
2. What is the impact of Chinese commercial relations with Sub-Saharan African countries?

This study explores the international political economy of mercantilism to assess the Beijing Consensus. The premise of mercantilism theory is that the government regulates the market to increase the nation's wealth. The Beijing Consensus in Sub-Saharan Africa is implemented through Chinese commercial engagement, which are foreign direct investment, trade and foreign aid.

Chinese commercial relations with Sub-Saharan African countries aim to attain larger potential market and natural resources. Moreover the positive impact of commercial engagement to Angola and Sudan is the promotion of economic development. However, the negative consequence is the commercial engagement hinders self-sufficiency because of the extractive nature of the investments. On the other hand, the gain for China is more political control over the Sub-Saharan African countries.

ABSTRAK

Elwiana Monica (1305003408)

KONSENSUS BEIJING: KEBIJAKAN LUAR NEGERI CINA DI NEGARA-NEGARA SUB-SAHARAN AFRICA (ANGOLA DAN SUDAN) SELAMA PEMERINTAHAN HU JINTAO

(xi + 83 halaman; 20 buku; 1 pernyataan resmi pemerintah; 11 jurnal; 54 sumber online)

KATA KUNCI: Konsensus Beijing, Kepentingan Nasional, Kepentingan Ekonomi National, Kebijakan Luar Negeri, Kebijakan Economy Luar Negeri, Investasi Asing, Perjanjian Perdagangan, Bantuan Luar Negeri

Model politik – ekonomi Cina telah berhasil meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang besar didalam komunitas internasional. Dalam tiga decade terakhir, perekonomian cina telah berkembang secara pesat alhasil dari model ekonomi Konsensus Beijing. Model ekonomi Cina memperkenalkan otoriterianisme pasar di Sub-Sahara afrika (Angola dan Sudan). Kajian ini membahas tentang pembangunan di Cina yang sudah dapat dibandingkan dengan Konsensus Washington. Tetapi, Kritik yang dinyatakan pada Konsensus Beijing adalah ketidakpedulian Cina terhadap isu-isu lingkungan, isu-isu hak asasi manusia, dan transparansi pemerintahan.

Pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimanakah elemen-elemen Konsensus Beijing diimplementasikan dalam hubungan ekonomi antara Cina dan negara-negara Sub-Sahara Afrika?
2. Apa dampak dari hubungan komersial Cina dengan negara-negara Sub-Saharan Afrika?

Penelitian ini mengeksplorasi ekonomi politik internasional merkantilisme untuk menilai Beijing Consensus. Premis teori merkantilisme adalah bahwa pemerintah mengatur pasar untuk meningkatkan kekayaan bangsa. Beijing Consensus di Sub-Sahara Afrika diimplementasikan melalui keterlibatan komersial Cina, yang merupakan investasi langsung asing, perdagangan dan bantuan luar negeri.

Hubungan komersial Cina dengan negara-negara Afrika Sub-Sahara bertujuan untuk mencapai potensi pasar yang lebih besar dan sumber daya alam. Selain itu dampak positif dari keterlibatan komersial ke Angola dan Sudan adalah promosi pembangunan ekonomi. Namun, konsekuensi negatif adalah keterlibatan komersial menghalangi swasembada karena sifat ekstraktif investasi. Di sisi lain, keuntungan untuk Cina lebih kontrol politik atas negara-negara Afrika Sub-Sahara.